

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pada Bab V, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi kebijakan pemberian tunjangan kinerja daerah di Kota Administrasi Jakarta Utara belum sepenuhnya berhasil. Beberapa tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan pemberian tunjangan kinerja daerah belum tercapai secara maksimal. Hal ini tercermin dari informasi yang penulis dapatkan dari para informan dan juga berdasarkan pengamatan penulis di lapangan. Dalam implementasi kebijakan pemberian tunjangan kinerja daerah masih dirasakan kurangnya koordinasi antar pihak yang terkait terutama dalam upaya penyelesaian masalah yang timbul dalam implementasi kebijakan pemberian tunjangan kinerja daerah.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan pemberian tunjangan kinerja daerah, antara lain :
 - a. Petunjuk pelaksanaan. Secara umum penjelasan secara tertulis kebijakan pemberian tunjangan kinerja daerah tersebut cukup memadai namun terdapat beberapa hal yang perlu dijelaskan secara lengkap dan terinci sehingga kebijakan tunjangan kinerja daerah tersebut tidak menimbulkan kerancuan penafsiran baik bagi para pelaksana maupun kelompok sasaran.
 - b. Disseminasi kebijakan. Disseminasi (penyebarluasan) kebijakan tunjangan kinerja daerah tersebut disampaikan kepada kelompok sasaran melalui kegiatan sosialisasi yang dilakukan kepada setiap SKPD/UKPD yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Penyebarluasan kebijakan yang hanya dari mulut ke mulut diantara pegawai sangat rentan terhadap penyebarluasan kebijakan yang tidak utuh.

- c. Pemahaman terhadap kebijakan. Sebagian dari pegawai tidak mengetahui secara utuh tujuan dari penerapan kebijakan pemberian tunjangan kinerja daerah dan mereka juga tidak mengetahui bagaimana teknis perhitungan kehadiran dan penilaian kinerja secara detail.
- d. Persepsi terhadap kebijakan. Persepsi para pegawai terhadap kebijakan pemberian tunjangan kinerja daerah adalah kalau datang terlambat akan dipotong. Oleh karena itu, Pemberian tunjangan kinerja daerah ini cukup efektif mengubah kebiasaan para pegawai yang sering datang terlambat.
- e. Penanganan permasalahan. permasalahan yang timbul terkait dengan kebijakan pemberian tunjangan kinerja daerah dapat langsung diselesaikan dengan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- f. Manfaat yang diterima oleh target group. Pemberian tunjangan kinerja daerah secara umum lebih meningkatkan kesejahteraan pegawai, meningkatkan kinerja pegawai, dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- g. Perubahan yang diinginkan dari adanya kebijakan. Pemberian tunjangan kinerja daerah diharapkan dapat lebih meningkatkan kesejahteraan pegawai, meningkatkan kinerja pegawai, dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- h. Sumber Daya. Dukungan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial sangat dibutuhkan dalam mendukung implementasi kebijakan pemberian tunjangan kinerja daerah.
- i. Komunikasi. kebijakan pemberian tunjangan kinerja daerah telah dikomunikasikan kepada seluruh SKPD/UKPD yang ada di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Utara dalam bentuk sosialisasi.

6.2 Saran

1. Perlu ditumbuhkan komitmen yang kuat di antara pihak-pihak yang terkait sehingga tujuan kebijakan yang telah ditetapkan terkait kebijakan pemberian tunjangan kinerja daerah dapat tercapai secara maksimal. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan koordinasi yang lebih intensif antara pihak-pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan pemberian tunjangan kinerja daerah.
2. Perlu dilakukan pengaturan yang lebih rinci mengenai tugas pokok dan fungsi pihak-pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan pemberian tunjangan kinerja daerah termasuk di tingkat kota administrasi sehingga para pegawai yang memiliki permasalahan terkait kebijakan tunjangan kinerja daerah tidak bingung harus mencari penyelesaian permasalahannya kemana.
3. Perlu dilakukan peningkatan pembinaan dan pengawasan terhadap para pegawai sehingga para pegawai tidak hanya datang ke kantor tepat waktu tetapi juga dapat meningkatnya kinerja para pegawai tersebut.
4. Perlu dilakukan evaluasi secara berkala terkait pelaksanaan implementasi kebijakan tunjangan kinerja daerah sehingga dapat diketahui hal-hal yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan kebijakan pemberian tunjangan kinerja daerah untuk dapat dilakukan upaya-upaya perbaikan ke depannya.